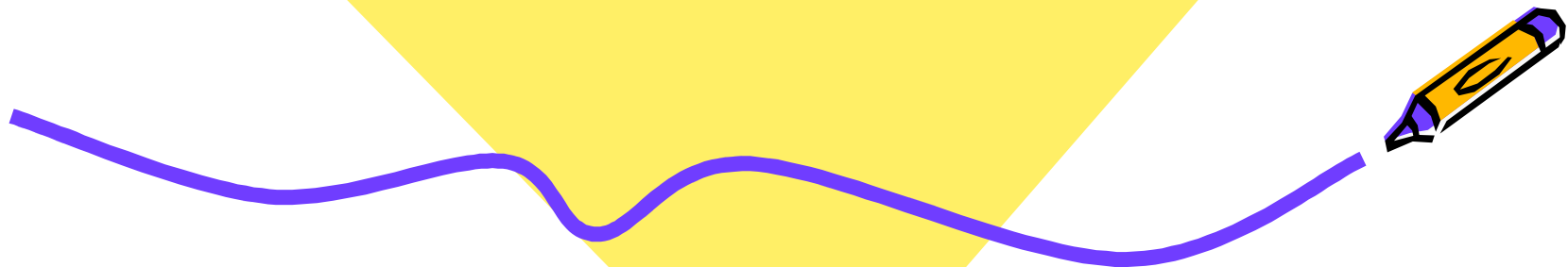




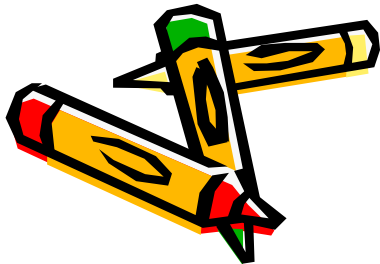
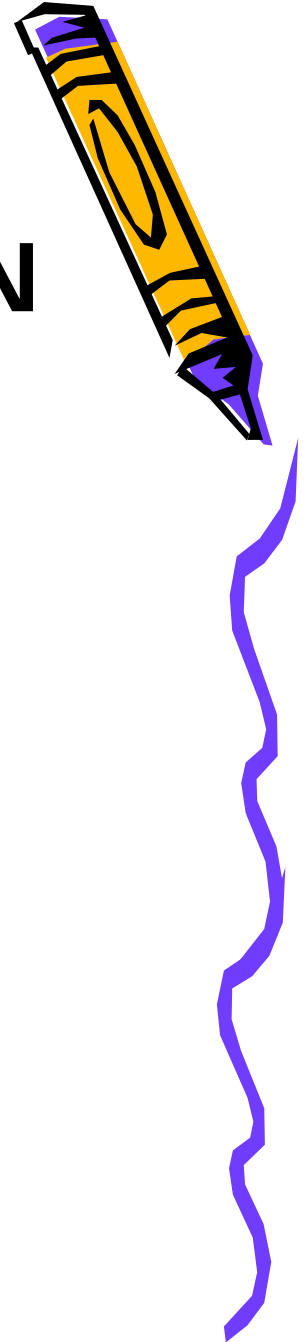
PENGELUARAN PEMERINTAH



anikwidiastuti@uny.ac.id

PENGGUNAAN PENGELUARAN PEMERINTAH

- MENJALANKAN RODA PEMERINTAHAN
- MEMBIAYAI KEGIATAN PEREKONOMIAN



PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN



1. PERAN ALOKATIF: mengalokasikan SDE agar pemanfaatannya optimal & efisien
2. PERAN DISTRIBUTIF: mendistribusikan SD, kesempatan & hasil ekonomi secara adil & wajar.
3. PERAN STABILISATIF: memelihara stabilitas perekonomian.
4. PERAN DINAMISATIF: menggerakkan proses pembangunan agar cepat tumbuh berkembang & maju.



FUNGSI PEMERINTAH DALAM SISTEM EKONOMI PASAR

- menyediakan kerangka hukum dan sosial,
- menjaga persaingan,
- menyediakan barang dan jasa publik,
- redistribusi pendapatan,
- mengatasi eksternalitas, dan
- menstabilkan ekonomi



Menjaga Kerangka Hukum dan Sosial

- Contoh: Membuat peraturan dan menyediakan pengadilan, menyediakan informasi dan pelayanan untuk membantu ekonomi berfungsi lebih baik, membangun sistem moneter, menetapkan dan menegakkan hak-hak kepemilikan properti.



Menjaga Persaingan

- Contoh: Membuat dan menegakkan peraturan anti persaingan usaha tidak sehat; mengatur monopoli alamiah.



Menyediakan Barang dan Jasa Publik

- Contoh: Menyediakan barang dan jasa yang tidak dapat atau tidak ingin disediakan oleh pasar, seperti pertahanan nasional.

Mengatasi Eksternalitas

- Contoh: Pajak untuk mengurangi eksternalitas negatif, seperti polusi lingkungan; subsidi untuk mendorong eksternalitas positif, seperti pendidikan. Eksternalitas muncul ketika pihak ketiga harus menanggung biaya atau memperoleh keuntungan terkait tindakan produksi atau konsumsi dari “tumpahan” produk, bukan langsung ditanggung oleh produsen atau konsumen.



Redisdribusi Pendapatan

- Contoh: Tingkat pajak pendapatan yang semakin tinggi bagi orang kaya daripada yang miskin, menyediakan jaminan sosial, dan bantuan bagi anak-anak yang membutuhkan. Pelayanan Kesehatan, Bantuan Kesehatan.

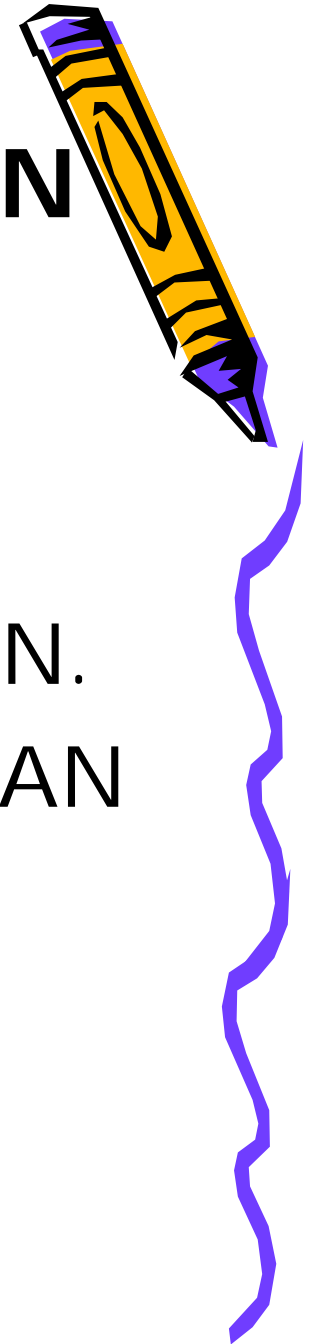


Stabilisasi Ekonomi

- Contoh: Menggunakan anggaran pemerintah dan/atau jumlah uang beredar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, dan mengurangi pengangguran.

DASAR TEORI PENGELUARAN PEMERINTAH

- $Y=C+I+G+(X-M)$
- PANDANGAN KAUM KEYNESSIAN.
- MAKNA: KENAIKAN PENGELUARAN PEMERINTAH → MENAIKKAN PENDAPATAN NASIONAL



SEBAB MENINGKATNYA PENGELUARAN PEMERINTAH

- MENURUT WAGNER, ADA 5 HAL YAITU:
 1. TUNTUTAN PENINGKATAN PERLINDUNGAN KEAMANAN & PERTAHANAN.
 2. KENAIKAN TINGKAT PENDAPATAN MASYARAKAT
 3. URBANISASI YG MENGIRINGI PERTUMBUHAN EKONOMI
 4. PERKEMBANGAN DEMOKRASI
 5. KETIDAKEFISIENAN BIROKRASI

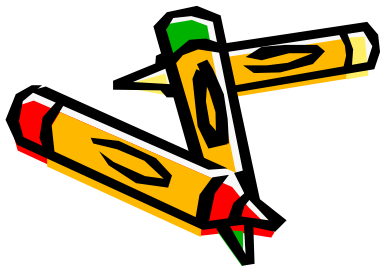
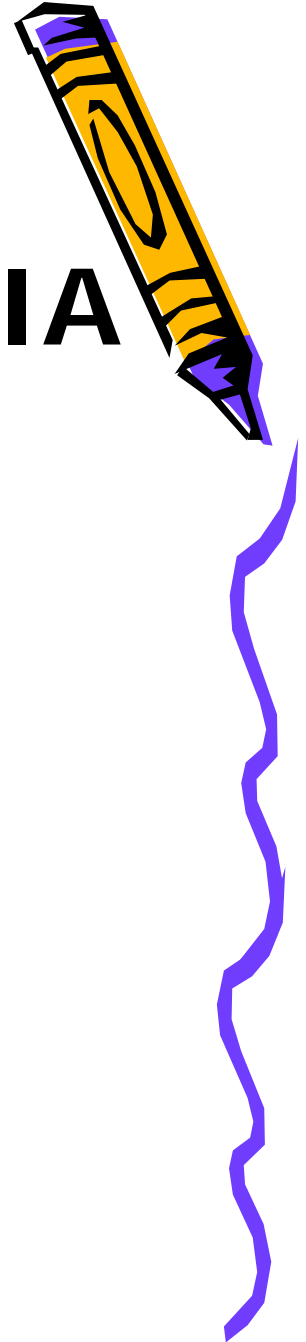
ROSTOW & MUSGRAVE



- MENGHUBUNGKAN PENGELUARAN PEMERINTAH DENGAN TAHAP PEMBANGUNAN
- TAHAP AWAL: rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relatif besar.
- ROSTOW → tahap lanjut: peralihan aktivitas pemerintah, dari penyedia prasarana ekonomi menjadi pengeluaran untuk pelayanan sosial (kesehatan & pendidikan)
- DLM KEADAAN NORMAL → kenaikan pendapatan nasional, menaikkan penerimaan & pengeluaran pemerintah

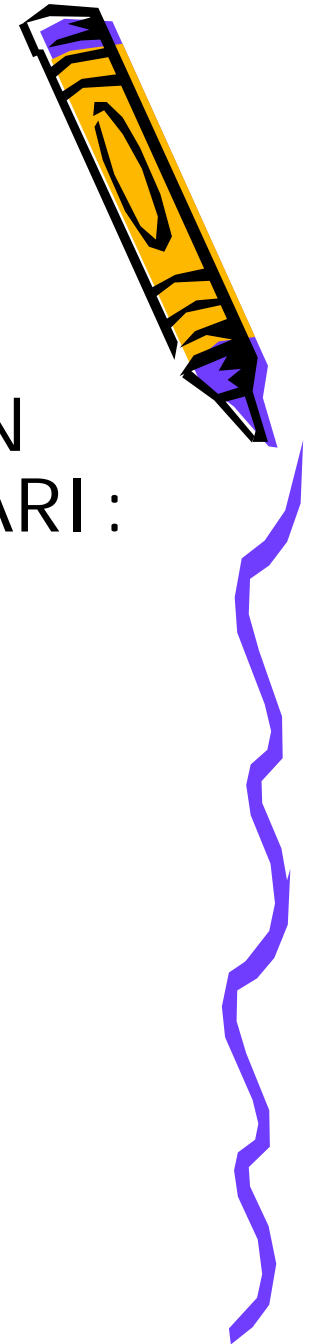
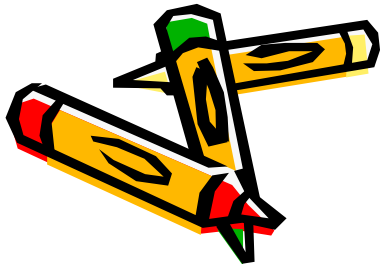
PENGELUARAN PEMERINTAH INDONESIA

- TERDIRI ATAS:
 1. PENGELUARAN RUTIN
 2. PENGELUARAN PEMBANGUNAN



PENGELUARAN RUTIN

- UNTUK MEMBIAYAI PELAKSANAAN RODA PEMERINTAHAN SEHARI-HARI :
 1. BELANJA PEGAWAI
 2. BELANJA BARANG
 3. SUBSIDI
 4. ANGSURAN & BUNGA UTANG PEMERINTAH
 5. DLL.

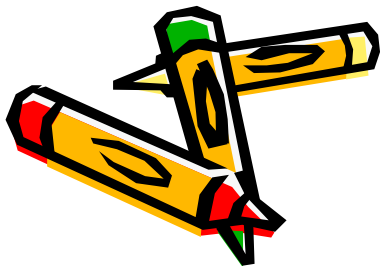
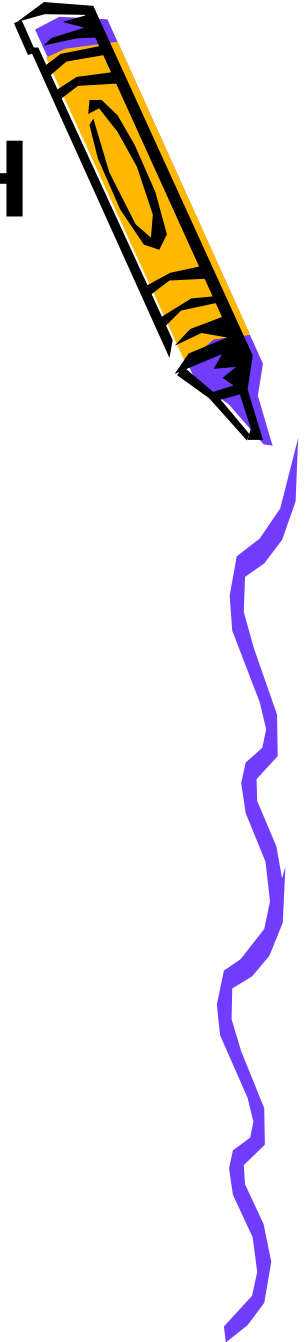


PENGELUARAN PEMBANGUNAN

- PENGELUARAN YG BERSIFAT MENAMBAH MODAL MASYARAKAT DLM BENTUK PRASARANA FISIK.
- DIBEDAKAN ATAS:
 1. pengeluaran pembangunan yg dibiayai dg rupiah
 2. pengeluaran pembangunan yg dibiayai dg bantuan proyek

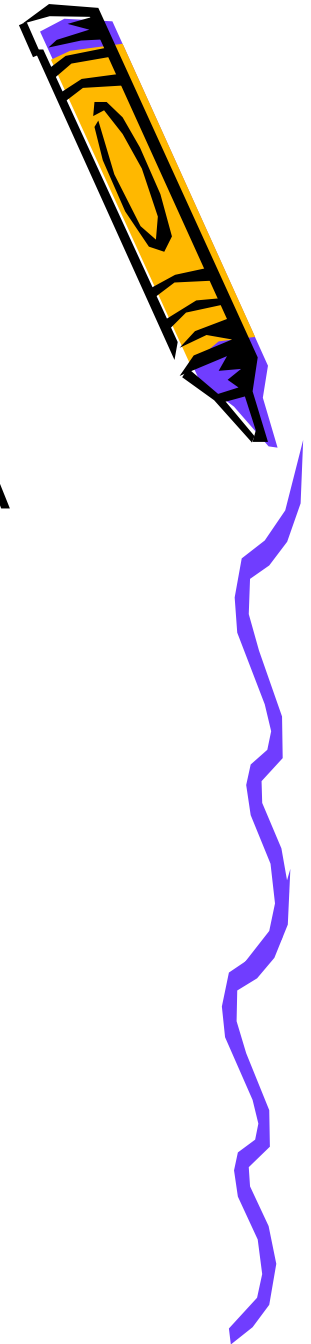
NERACA PEMERINTAH PUSAT

- 1. NERACA PRODUKSI
- 2. NERACA PENERIMAAN & PENGELUARAN
- 3. NERACA MODAL



NERACA PRODUKSI

- MENGGAMBARKAN BAGAI MANA PROSES KGT PEMERINTAH DLM MENCIPTAKAN NILAI TAMBAH PDB SEKTOR PEMERINTAH & PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH





NERACA PRODUKSI (TERDIRI ATAS)

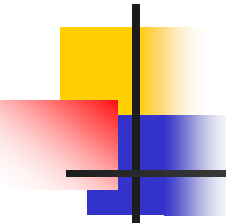
- AYAT BIAYA (INPUT), TERDIRI DARI:

- 1) BELANJA BARANG
- 2) BELANJA PEGAWAI
- 3) PENYUSUTAN BARANG MODAL
- 4) PAJAK TAK LANGSUNG.

- AYAT PRODUKSI (OUTPUT), TERDIRI DARI:

- 1) PRODUKSI YG DIKONSUMSI SENDIRI
- 2) PENERIMAAN JASA
- 3) PRODUKSI BARANG

NERACA PENERIMAAN & PENGELUARAN



- MEMPERLIHATKAN BAGAIMANA PROSES KEGIATAN PEMERINTAH PUSAT DALAM MEMBENTUK TABUNGANNYA.
- MEMUAT TRANSAKSI ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAH DG SWASTA, PEMERINTAH DG BUMN, PEMERINTAH DG RT, PEMERINTAH DG LUAR NEGERI

NERACA PENERIMAAN & PENGELUARAN

□ PENGELUARAN:

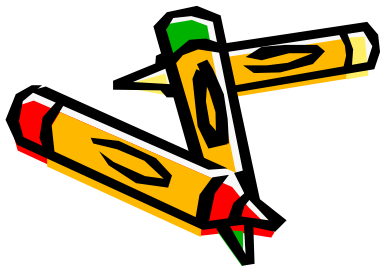
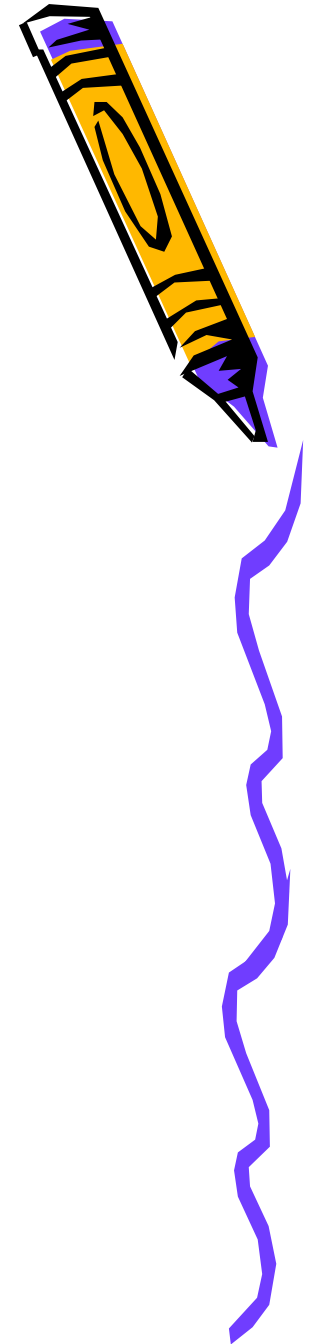
1. KONSUMSI PEMERINTAH
2. PROPERTY INCOME DIBAYARKAN
3. SUBSIDI
4. BANTUAN SOSIAL
5. IMPUTASI KESEJAHTERAAN PEGAWAI
6. TRANSFER2
7. TABUNGAN PEMERINTAH

□ PENERIMAAN:

1. LABA BERSIH
2. PROPERTY INCOME DITERIMA
3. PAJAK TAK LANGSUNG
4. PUNGUTAN & DENDA
5. IMPUTASI KESEJAHTERAAN PEGAWAI
6. TRANSFER2

NERACA MODAL

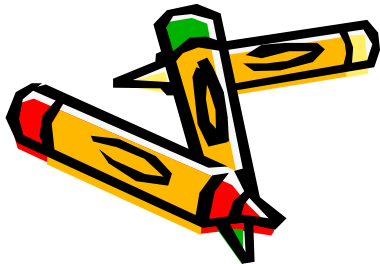
- MENGGAMBARAKAN PROSES KEGIATAN PEMERINTAH DLM MEMBENTUK MODAL (INVESTASI).



NERACA MODAL

- **PENGELUARAN:**
 1. **PERUBAHAN STOK**
 2. **PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO**
 3. **PEMBELIAN TANAH**
 4. **PEMBELIAN BARANG MODAL**
 5. **TRANSFER MODAL**

- **PENERIMAAN:**
 1. **TABUNGAN BRUTO**
 2. **PENYUSUTAN BARANG MODAL**
 3. **TRANSFER MODAL**
 4. **PINJAMAN NETO**



ANGGARAN PENDIDIKAN 2007 - 2012
(miliar rupiah)

Komponen Anggaran Pendidikan	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1. Anggaran Pendidikan Melalui Belanja Pemerintah Pusat	55.668,2	58.565,4	90.632,2	96.480,3	105.356,4	102.518,3
2. Anggaran Pendidikan Melalui Transfer Ke Daerah	86.534,4	95.620,1	117.654,4	127.749,1	158.966,5	186.439,5
a. DAK Bidang Pendidikan	5.195,3	7.015,4	9.334,9	9.334,9	10.041,3	10.041,3
b. BA Pendidikan yang dialokasikan dalam DAU - Non Gaji	6.591,5	7.180,3	13.425,4	11.365,7	11.276,6	10.838,6
c. BA Pendidikan yang dialokasikan dalam DAU - Gaji Pendidik	74.747,6	81.424,4	84.557,4	84.557,4	93.013,1	103.016,9
d. BA Pendidikan yang dialokasikan dalam DBH	-	-	609,7	748,5	882,4	815,6
e. BA Pendidikan yang dialokasikan dalam Dana Otsus	-	-	2.237,0	2.309,9	2.706,4	3.285,8
f. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	-	-	7.490,0	5.800,0	3.696,2	2.898,9
g. Tunjangan Profesi Guru	-	-	-	10.994,9	18.537,7	30.559,8
h. Dana Insentif Daerah	-	-	-	1.387,8	1.387,8	1.387,8
i. Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Pendidikan	-	-	-	1.250,0	613,0	-
j. Bantuan Operasional Sekolah	-	-	-	-	16.812,0	23.594,8
3. Anggaran Pendidikan Melalui Pengeluaran Pembiayaan (Dana Pengembangan Pendidikan Nasional)	-	-	-	1.000,0	2.617,7	1.000,0
4. Anggaran Pendidikan (1 + 2 + 3)	142.202,5	154.185,5	208.286,6	225.229,3	266.940,6	289.957,8
5. Total Belanja Negara	752.373,3	989.493,8	1.000.843,9	1.126.146,5	1.320.751,3	1.435.406,7
Rasio Anggaran Pendidikan (4 : 5) X 100%	18,9	15,6	20,8	20,0	20,2	20,2

ANGGARAN PROGRAM KEMISKINAN, 2000 - 2012

Tahun	Rp (triliun)	Penduduk Miskin (% total penduduk)
2000	18,0	19,1
2001	25,0	18,4
2002	21,5	18,2
2003	24,5	17,4
2004	28,0	16,7
2005	23,4	16,0
2006	46,6	17,8
2007	53,1	16,6
2008	60,6	15,4
2009	80,1	14,2
2010	81,4	13,3
2011	93,8	11,5-12,5
2012	99,2	10,5-11,5

Sumber: Penduduk Miskin : BPS

ANGGARAN KESEHATAN, 2005 - 2012

(miliar rupiah)

Komponen Anggaran Kesehatan	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Real.	Real.	Real.	Real.	Real.	Real.	APBN	APBN
1. Anggaran Kesehatan Melalui Belanja Pemerintah Pusat	11.859,7	19.578,0	20.646,9	20.052,1	23.242,5	28.176,3	40.135,2	44.195,2
A. Melalui Kementerian Negara/Lembaga	11.474,9	19.091,5	19.971,6	18.898,9	21.720,5	26.230,1	37.827,4	41.519,0
i. Kementerian Kesehatan	7.944,4	12.260,5	15.588,4	15.886,2	18.023,6	22.445,4	27.657,1	29.915,8
ii. Badan Pengawas Obat dan Makanan	229,8	302,4	378,0	395,3	349,7	410,0	928,8	1.104,1
iii. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	7,7	337,2	468,3	479,8	626,9	797,5	2.413,2	2.593,7
iv. Kementerian Pendidikan Nasional	4,8	10,1	17,7	10,9	-	9,7	-	393,7
v. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,9	0,3	32,7	41,0	58,4	26,2	108,8	128,2
vi. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	-	3,5	3,6	3,1	8,9	3,4	3,5	36,2
vii. Kementerian ESDM	71,3	102,1	26,6	71,9	16,6	54,1	-	-
viii. Kementerian PU	2.741,8	5.188,5	940,5	1.454,2	1.986,5	1.699,3	6.148,5	6.438,7
ix. Kementerian Lingkungan Hidup	5,5	-	46,6	58,1	46,1	29,6	75,0	81,9
x. Kementerian Ristek	-	-	-	24,2	20,6	18,5	24,6	22,0
xi. Kementerian Pertanian	35,4	191,9	-	402,2	477,1	529,9	194,0	362,1
xii. Kementerian Kelautan dan Perikanan	-	-	53,8	68,7	106,1	206,5	35,7	51,7
xii. Kementerian Lainnya	433,3	695,1	2.415,5	3,4	-	-	238,4	390,8
Total Anggaran K/L	120.823,0	189.361,2	225.014,2	259.701,9	306.999,5	330.492,6	432.779,3	508.359,6
B. Melalui Non-Kementerian Negara/Lembaga BA 999	384,8	486,5	675,3	1.153,2	1.522,0	1.946,2	2.307,8	2.676,3
i. Subsidi Untuk Air Bersih	-	-	-	-	-	-	50,0	30,0
ii. Askes PNS (Belanja Pegawai)	384,8	486,5	675,3	1.153,2	1.522,0	1.946,2	2.257,8	2.646,3
2. Anggaran Kesehatan Melalui Transfer ke daerah	886,3	2.930,0	3.875,7	4.355,9	4.576,6	3.407,3	3.677,4	3.814,5
1. DAK Kesehatan	620,0	2.406,8	3.381,3	3.817,4	4.017,4	2.829,8	3.000,8	3.005,9
2. Dana Otonomi Khusus Kesehatan Papua dan Papua Barat	266,3	523,2	494,4	538,5	559,2	577,5	676,6	808,6
3. Total Anggaran Kesehatan (1+2)	12.746,0	22.508,0	24.522,6	24.408,0	27.819,1	31.583,6	43.812,6	48.009,7
4. Total Belanja Negara	517.517,6	699.099,2	752.373,3	989.493,7	937.382,0	1.056.510,3	1.229.558,5	1.418.497,7
Rasio Anggaran Kesehatan = (3:4)X100%	2,5	3,2	3,3	2,5	3,0	3,0	3,6	3,4

ANGGARAN PERTANIAN, 2007 - 2012
(miliar rupiah)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
					APBN-P	APBN
1. Belanja Pemerintah Pusat	20.941,6	39.582,0	41.781,0	44.927,2	51.854,0	52.018,1
a. Fungsi pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan	7.570,3	11.241,8	8.716,8	9.004,7	17.219,9	18.717,5
b. Subsidi	13.371,3	28.340,2	33.064,2	35.922,5	34.634,1	33.300,6
1. Pupuk	6.260,5	15.181,5	18.329,0	18.410,9	18.803,0	16.944,0
2. Benih	479,0	985,2	1.597,2	2.177,5	120,3	279,9
3. Kredit Program	47,5	77,6	151,0	180,3	443,8	469,7
4. Pangan	6.584,3	12.095,9	12.987,0	15.153,8	15.267,0	15.607,1
2. Transfer ke Daerah	1.492,2	1.492,2	1.492,2	1.543,6	1.806,1	1.879,6
- DAK Bidang Pertanian	1.492,2	1.492,2	1.492,2	1.543,6	1.806,1	1.879,6
Total	22.433,8	41.074,2	43.273,2	46.470,8	53.660,1	53.897,7

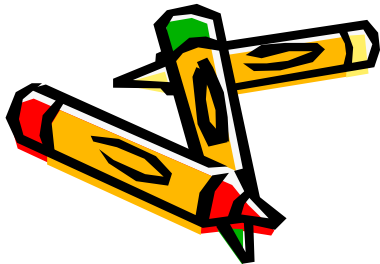
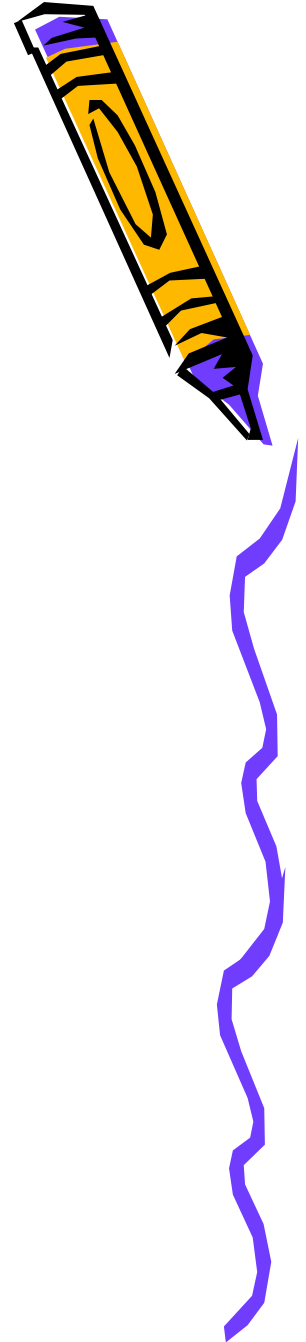
RINCIAN ANGGARAN INFRASTRUKTUR MENURUT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2005 - 2012
(miliar rupiah)

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011		2012
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	APBN-P	Realisasi Sementara	APBN
1. Kementerian Negara/Lembaga (Miliar Rupiah)	23.809,8	46.150,2	50.956,7	68.023,3	78.116,8	75.385,7	129.721,0	104.866,2	142.634,8
1 Kementerian Pekerjaan Umum	13.328,9	19.186,7	22.769,5	30.670,0	40.082,7	32.107,9	56.535,3	50.393,2	62.563,1
2 Kementerian Perhubungan	3.978,5	6.769,7	9.070,4	13.477,1	15.557,3	15.420,1	23.134,6	19.784,8	28.117,7
3 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	3.117,1	4.657,6	5.141,6	5.442,5	6.577,2	5.534,1	15.674,9	8.895,1	15.804,7
4 Kementerian Dalam Negeri	637,6	1.158,0	3.118,2	5.303,0	8.315,1	13.403,3	16.792,7	12.815,2	17.134,4
5 Kementerian Kelautan dan Perikanan	1.745,8	2.566,3	2.343,1	2.398,9	3.205,6	3.380,8	5.559,2	4.975,8	5.993,3
6 Kementerian Komunikasi dan Informatika	429,1	1.235,7	1.016,0	996,0	1.360,0	2.196,7	3.452,3	1.842,3	3.246,0
7 Kementerian Negara Perumahan Rakyat	84,1	369,2	419,6	590,8	1.277,5	913,9	3.462,0	2.325,2	4.604,1
8 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	73,9	230,2	384,8	918,4	931,2	1.040,0	1.263,4	1.005,8	1.018,3
9 Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias	414,7	9.976,7	6.532,8	7.619,1	-	-	-	-	-
10 Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana	-	-	46,7	94,5	104,4	239,4	938,9	1.147,2	995,1
11 Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	-	-	113,9	513,0	705,8	636,9	1.286,1	571,0	1.606,9
12 Badan SAR Nasional	-	-	-	-	-	512,6	1.329,2	1.041,5	1.111,7
13 Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	-	-	-	-	-	-	292,5	69,1	299,6
14 Pengembangan Otorita Batam	-	-	-	-	-	-	-	-	140,0
2. Non K/L (Miliar Rupiah)	2.304,3	7.853,4	8.857,8	10.633,9	13.227,6	23.985,2	22.051,7	20.756,7	18.837,5
1 Risiko Kenaikan Harga Tanah (<i>land capping</i>)	-	-	-	264,9	400,8	352,8	610,0	406,2	500,0
2 Investasi Pemerintah untuk Infrastruktur	-	2.000,0	2.000,0	-	500,0	3.610,5	4.571,6	4.571,6	6.008,9
3 PSO	675,5	1.215,0	1.025,1	1.688,4	1.289,8	1.373,9	1.849,4	1.833,9	2.045,7
4 Kredit Program KPRSH & Rusunami	110,1	252,0	300,0	800,0	774,8	416,0	696,2	611,8	-
5 Dana Alokasi Khusus	1.518,7	3.811,4	4.782,7	6.550,5	7.192,2	4.493,1	6.051,0	6.051,0	6.327,4
6 Tambahan Otonomi Khusus Infrastruktur	-	575,0	750,0	330,0	2.070,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0	1.000,0
7 Dana Kontijensi PLN	-	-	-	-	-	-	889,0	-	623,3
8 Dana Kontijensi PDAM	-	-	-	-	-	-	15,0	-	10,0
9 Pinjaman pada PT PLN	-	-	-	-	-	7.500,0	-	-	-
10 Dana Bergulir Pengadaan Tanah	-	-	-	-	-	2.300,0	3.850,0	3.850,0	900,0
11 Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang	-	-	-	-	-	398,9	392,2	392,2	392,2
12 Pengembangan Otorita Batam	-	-	-	-	-	140,0	140,0	140,0	-
13 Merauke <i>Integrated Food and Energy Estate</i>	-	-	-	-	-	-	87,3	-	-
14 PMN untuk PT SMI	-	-	-	1.000,0	-	1.000,0	-	-	-
15 PMN untuk PT PII	-	-	-	-	1.000,0	1.000,0	1.500,0	1.500,0	1.000,0
16 Pengembangan kawasan Bintan dan Karimun	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0
Total	26.114,2	54.003,6	59.814,4	78.657,2	91.344,4	99.370,9	151.772,7	125.622,8	161.472,3



INEFISIENSI PENGELUARAN PEMERINTAH

- Subsidi BBM
- Studi banding/perjalanan ke luar negeri



sumber

- <http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/edef-seputar-list.asp?apbn=infra>
- Dumairy. (1996). Perekonomian Indonesia. Yogyakarta: BPF E

